

Afeksi dan Kesadaran Politik Perempuan Pekerja Migran Indonesia

Affection and Political Awareness of Indonesian Migrant Women Workers

Ikhaputri Widiantini¹ & Abby Gina Boang Manalu²

Universitas Indonesia^{1&2} & Jurnal Perempuan^{1&2}
Kampus UI Depok, Jawa Barat, 16424, Indonesia^{1&2}
Alamanda Tower 25th Floor, Jalan T. B. Simatupang kav. 23-24, Jakarta 12430, Indonesia^{1&2}

ikhaputri@ui.ac.id¹ & abby@jurnalperempuan.com²

Kronologi Naskah: diterima 27 Desember 2024, direvisi 29 Desember 2024, diputuskan diterima 31 Desember 2024

Abstract

The problems experienced by Indonesian female migrant workers both in their own country and in the destination country show how vulnerable they are to violence. Most of them are workers in the informal sector such as domestic and care workers, who are categorized as low-skilled workers. As a result of this categorization, they often experience discrimination and even violence. This is the impact of neglecting experiences, especially in fulfilling political rights, which hinders full access to policy guarantees that protect them. Data were collected using literature analysis and secondary research. This study uses a philosophical approach based on Sara Ahmed's theory of affection and Nancy Fraser's recognition of how the experiences of Indonesian female migrant workers need to include empathetic emotional values and recognition of the political rights of Indonesian female migrant workers. The findings of this article highlight the importance of fostering political awareness through the integration of affection and recognition in understanding and overcoming the political injustice of Indonesian female migrant workers.

Keywords: affection, political awareness, Indonesian Female Migrant Workers, recognition

Abstrak

Persoalan yang dialami perempuan pekerja migran Indonesia baik di dalam negara sendiri maupun di negara tujuan bekerja menunjukkan betapa mereka adalah warga negara yang rentan mengalami kekerasan. Sebagian besar dari mereka merupakan pekerja di sektor informal, seperti pekerja rumah tangga dan perawatan, yang dikategorikan sebagai tenaga kerja berketerampilan rendah. Akibat pengategorian ini, mereka sering kali mengalami diskriminasi bahkan kekerasan. Hal ini merupakan dampak dari pengabaian pengalaman terutama dalam pemenuhan hak politik yang menghambat akses penuh atas jaminan kebijakan yang melindungi mereka. Data dikumpulkan menggunakan analisis literatur dan riset sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis yang berdasarkan penelusuran teori afeksi dari Sara Ahmed dan rekognisi dari Nancy Fraser untuk bagaimana pengalaman perempuan pekerja migran Indonesia perlu memasukkan nilai emosi yang empatik dan pengakuan hak politik perempuan pekerja migran Indonesia. Temuan tulisan ini menyoroti pentingnya menumbuhkan kesadaran politik melalui integrasi antara afeksi dan rekognisi dalam memahami dan mengatasi ketidakadilan politik perempuan pekerja migran Indonesia.

Kata kunci: afek, kesadaran politik, Perempuan Pekerja Migran Indonesia, rekognisi.

Pendahuluan

Perempuan Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disebut PPMI) memiliki peran penting dalam menopang perekonomian nasional. Pada tahun 2022, lebih dari 61 persen dari total pekerja migran Indonesia adalah perempuan (BP2MI 2024). Dari angka tersebut, sekitar 23,2 persen adalah pekerja rumah tangga (Solidaritas Perempuan 2024). Meskipun kontribusi ekonominya sangat besar, mereka sering kali terpinggirkan dalam diskursus politik. Pada proses pemilihan umum Indonesia tahun 2024, persoalan mengenai PMI khususnya perempuan hanya menjadi bahasan di permukaan. Perempuan PMI jarang diakui sebagai

subjek politik yang penting, baik oleh negara asal maupun negara tujuan.

Keterlibatan Perempuan PMI dalam pemilihan umum Indonesia, misalnya, masih menghadapi banyak kendala. Akses terhadap hak suara sering kali terbatas karena kurangnya sosialisasi hak politik, minimnya infrastruktur pemilu di negara tujuan, serta status hukum yang tidak jelas bagi sebagian besar buruh migran perempuan (Solidaritas Perempuan 2024). Perasaan keterasingan yang mereka alami di negara tujuan, baik secara sosial maupun politik, memperdalam jarak antara mereka dan proses politik di negara asal. Pengalaman seperti kerinduan pada keluarga, rasa

tidak berdaya, dan frustrasi karena eksploitasi kerja menambah dimensi emosional yang memperkuat keterpinggiran politik mereka (IMWU 2022).

Proses mengenali pengalaman para Perempuan PMI menjadi urgen untuk dilakukan, terutama keterkaitan menempatkan mereka sebagai subjek politik. Pengalaman—termasuk emosi yang mereka rasakan—tidak hanya berfungsi sebagai reaksi pasif terhadap kondisi sosial, tetapi juga dapat berfungsi sebagai pendorong penting bagi kesadaran politik dan mobilisasi sosial (Lindio-McGovern 2019). Emosi seperti keterasingan dan frustrasi, jika dibingkai dalam konteks kolektif, dapat menjadi dasar solidaritas politik yang kuat. Perempuan PMI memiliki potensi besar menjadi kekuatan politik yang signifikan, terutama bagaimana mereka terlibat langsung dengan pengalaman atas ketidakadilan sebagai warga negara dengan hak politiknya.

Dalam pendekatan politik tradisional, ada kecenderungan meminggirkan peran afeksi. Emosi dan pengalaman personal dianggap tidak relevan dalam sebuah tindakan politis. Namun sebetulnya, emosi dan pengalaman personal justru dapat dikembangkan menjadi sebuah keunikan kesadaran politik. Afeksi kolektif dapat mendorong mobilisasi gerakan politik di tengah ketidakadilan sistemik. Sara Ahmed¹ dalam bukunya *The Cultural Politics of Emotion* (2004) menyebutkan bahwa afeksi dapat membentuk identitas kolektif yang memungkinkan kelompok termarginalkan, seperti perempuan pekerja migran Indonesia, membangun solidaritas di antara mereka. Dalam konteks ini, para pekerja migran Indonesia, terutama perempuan, dapat memanfaatkan pengalaman emosional mereka—terkait frustrasi dan kekecewaan atas tidak adanya jaminan dari kebijakan terkait kerja PMI—untuk menciptakan gerakan sosial yang menuntut hak politik dan sosial mereka.

Gerakan sosial perempuan PMI kemudian dapat diperkuat juga dengan bentuk aksi kolektif, seperti bentuk protes, kampanye, dan advokasi untuk memperjuangkan hak-hak politik mereka. Apabila kita membandingkan dengan beberapa gerakan perempuan pekerja migran dari negara lain, tindakan politis yang dilakukan oleh para perempuan pekerja migran Indonesia sebenarnya telah banyak ditemukan. Perempuan pekerja migran Indonesia juga telah membentuk organisasi dan jaringan solidaritas sebagai upaya menuntut pengakuan secara politis.

Kita dapat belajar dari salah satu contoh gerakan politik di Filipina. Sejak tahun 1984, terbentuk sebuah aliansi yang melakukan mobilisasi politis yang dilakukan secara kolektif untuk perempuan Filipina (UN 2007), melalui *General Assembly Binding Women for Reform, Integrity, Equality, Leadership, and Action* (GABRIELA). Aliansi GABRIELA ini secara umum memperjuangkan hak-hak perempuan Filipina bahkan hingga menjamin adanya representasi di tingkat legislatif. Aliansi GABRIELA juga banyak mengangkat isu akar rumput termasuk memperjuangkan hak-hak perempuan pekerja migran (Karan, Gimeno, & Tandoc 2009). Aliansi ini mendorong juga para perempuan pekerja migran Filipina untuk berperan aktif dalam proses politik negara asal mereka—termasuk dalam pemilihan umum. Berkat gerakan sosial dan politik ini, gerakan perempuan pekerja migran Filipina memiliki struktur yang lebih terorganisir dan mendapatkan dukungan dari pemerintah serta organisasi internasional.

Contoh pengalaman gerakan politik perempuan di Filipina ini dapat kita jadikan sebagai pembelajaran yang menjadi landasan dalam penelitian ini—terkait upaya penjaminan hak dan perlindungan perempuan pekerja migran—sehingga dapat kita temukan akar persoalan yang bersifat filosofis. Secara khusus, kami akan mengerucutkan pada persoalan dan pembatasan hak politis pada perempuan pekerja migran Indonesia sehingga dapat menjadi landasan yang memperkuat analisis atas pentingnya memahami peran afeksi dalam membentuk kesadaran politik secara kolektif—lewat pengakuan dan solidaritas. Hal ini diharapkan dapat memberikan dukungan bagi pengorganisasian perempuan pekerja migran Indonesia dalam merebut hak politik mereka. Untuk kepentingan tersebut, maka perlu dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian yang mencakup: 1) Bagaimana afeksi dapat membentuk kesadaran politik perempuan pekerja migran Indonesia?; 2) Bagaimana rekognisi pengalaman perempuan pekerja migran Indonesia dapat menjadi pendorong gerakan dan solidaritas politik?; 3) Bagaimana perempuan pekerja migran Indonesia dapat memunculkan keunikan gerakan sosial sebagai bentuk mobilisasi kolektif dalam perjuangan politiknya? Ketiga pertanyaan besar ini yang akan menjadi landasan penelitian dibangun.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana pengalaman afektif perempuan pekerja migran Indonesia membentuk kesadaran politik mereka, serta bagaimana afeksi ini memicu mobilisasi gerakan

sosial di negara tujuan sebagai bentuk kepedulian atas situasi politik di negara asal. Dengan demikian, penelitian ini berusaha memahami bagaimana buruh migran perempuan Indonesia dapat bertransformasi dari kelompok yang terpinggirkan menjadi subjek politik yang aktif melalui solidaritas yang didasarkan pada pengalaman afektif.

Kerangka Teori dan Metode Penelitian

Kami memulai penelitian ini dengan pertanyaan mengenai peran afeksi dalam membentuk kesadaran politik sebelum masuk pada persoalan keadilan sosial dan politik—sebagai bentuk gerakan sosial dan politik—perempuan pekerja migran Indonesia. Penulis melihat afeksi sebagai elemen utama yang mencakup berbagai perasaan dan emosi yang dialami pekerja migran dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mencakup perasaan seperti keterasingan, kerinduan, ketidakadilan, dan harapan. Setidaknya pengalaman dan emosi tersebut dapat dieksplorasi untuk membuktikan bahwa itu tidak sekadar reaksi emosional—karena dapat menjadi dasar pembentukan kesadaran politik dan solidaritas.

Pendekatan yang digunakan Sara Ahmed terkait emosi yang bersifat politis dan kultural ini akan menunjukkan bahwa emosi pada akhirnya tidak bersifat privat (2004). Ada keterkaitan sifat sosial dan politis yang dapat menjadi penggerak gerakan secara kolektif. Emosi kolektif ini menghubungkan pengalaman pribadi dengan solidaritas yang lebih besar (Ahmed 2004). Setelah menelusuri relasi afeksi dan kesadaran sosial—dalam bentuk solidaritas—kami masuk dengan pendekatan Nancy Fraser² dalam tulisan yang berjudul *Social Justice in the Age of Identity Politics: Redistribution, Recognition, and Participation* pada buku yang dituliskan bersama Axel Honneth, *Redistribution or Recognition? A Political-Philosophy Exchange* (2003). Fraser menekankan pentingnya pengakuan sebagai bagian dari keadilan sosial, selain redistribusi ekonomi. Keadilan sosial juga mencakup pengakuan identitas dan hak kelompok yang terpinggirkan (Fraser 2003). Pengakuan dalam konteks ini terkait dengan perlakuan setara dan partisipasi politik penuh bagi tiap individu. Terkait hal tersebut, maka perlu ada partisipasi aktif dalam politik. Bagi Fraser (2003), gerakan sosial yang efektif harus memperjuangkan dua hal: 1) redistribusi (perbaikan ekonomi dan sosial); 2) rekognisi (pengakuan identitas sosial dan politik).

Kedua teori ini kami gunakan dalam pembahasan berlapis untuk menguatkan kerangka pemahaman

gerakan sosial perempuan pekerja migran Indonesia. Afeksi berperan untuk menjadi titik berangkat yang memicu kesadaran politik lewat kolektif solidaritas. Afeksi dan pengalaman para perempuan pekerja migran Indonesia memberikan motivasi untuk mereka bergerak. Kemudian teori rekognisi menjadi dorongan lebih lanjut untuk memunculkan sebuah gerakan sosial yang lebih terstruktur—melibatkan redistribusi sumber daya dan pengakuan hak politik.

Kerangka teori ini kami bangun untuk menganalisis data yang dikumpulkan melalui metode studi literatur dan riset sekunder untuk memahami pengalaman dan afeksi terbentuk dalam kesadaran politik perempuan pekerja migran Indonesia. Studi literatur dalam penelitian ini dilakukan untuk memahami lebih dalam teori dan penelitian terkait afeksi dalam politik, gerakan sosial, serta bagaimana perempuan pekerja migran Indonesia ditempatkan sebagai subjek politik. Metode riset sekunder kami lakukan dengan menganalisis berbagai laporan riset dari berbagai lembaga yang mendokumentasikan kondisi perempuan pekerja migran Indonesia di negara tujuan, terutama terkait akses mereka atas hak politik. Data yang terkumpul kami analisis dengan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait afeksi sebagai pemicu kesadaran politik yang menjadi basis solidaritas di antara perempuan pekerja migran Indonesia, pengalaman gerakan sosial dan politik berbagai organisasi perempuan pekerja migran, hingga refleksi dan sorotan atas keunikan gerakan sosial yang muncul pada perempuan pekerja migran Indonesia.

Kesamaan Rasa: Diskriminasi yang Mengatasnamakan Pembedaan Keterampilan

Kesamaan rasa menjadi salah satu faktor penentu dalam penelusuran kajian ini. Perempuan pekerja migran asal Indonesia memiliki sejarah dan pengalaman yang serupa dengan beberapa negara di wilayah Asia Tenggara. Asia Tenggara cukup dikenal sebagai wilayah yang menyalurkan banyak pekerja migran ke berbagai negara (Yeoh 2024). Permintaan besar untuk tenaga kerja dari Asia Tenggara ini diawali dari ledakan minyak di Timur Tengah dan negara-negara Teluk pada tahun 1970-an yang membutuhkan banyak tenaga kerja konstruksi. Filipina, Indonesia, dan Thailand menjadi negara dengan jumlah pekerja migran terbanyak di sektor minyak. Hal ini terjadi karena belum ada regulasi pengupahan yang layak sehingga para pekerja migran dari Asia Tenggara cenderung dibayar rendah—selain juga karena alasan kenetralan politik

(Yeoh 2024). Filipina memanfaatkan situasi ini dengan mempromosikan migrasi sebagai salah satu strategi pembangunan negara—mengatasi pengangguran dan juga devisa.

Permintaan atas tenaga kerja di sektor domestik pun mulai bermunculan di tahun 1980-an. Banyak negara di Asia yang mengalami pertumbuhan ekonomi akibat berkembangnya sektor industri sehingga membutuhkan pekerja dengan keterampilan rendah serta sektor informal di wilayah perawatan dan pekerjaan rumah tangga. Bahkan di Asia Tenggara sendiri, negara seperti Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam banyak menyerap pekerja migran dari Indonesia dan Filipina. Thailand sendiri telah menjadi negara tujuan para pekerja migran dari Myanmar, Kamboja, Laos, dan Vietnam (Yeoh 2024). Pengiriman skala besar pekerja migran di wilayah domestik—yang didominasi perempuan—mendukung promosi pembangunan yang menekankan manfaat pada para pekerja migran, negara tujuan, dan negara asal. Penekanan bahwa migrasi akan mengurangi kemiskinan jika dikelola dengan baik membuat banyak perusahaan pemberi kerja mendorong lebih banyak masyarakat dari beberapa wilayah ini untuk terlibat dalam perbaikan ekonomi, baik untuk keluarganya maupun untuk negara (Yeoh 2024).

Persoalan muncul ketika negara mengabaikan kata kunci “keterampilan” kerja para pekerja migran. Terjadi berbagai pelanggaran hak yang dialami oleh para pekerja migran—terutama mereka yang dikategorikan sebagai pekerja dengan keterampilan rendah, serta pekerja di sektor domestik (pekerja rumah tangga dan pekerja perawatan). Para pekerja migran dengan keterampilan ahli umumnya akan lebih mudah mendapatkan keistimewaan di tempat tujuan kerjanya (Goh & Yeoh 2017; Yeoh 2024). Fasilitas dan kemudahan akses untuk mendapatkan izin tinggal permanen, jaminan kerja dan hidup, hingga kewarganegaraan lebih mudah diberikan kepada pekerja migran “tenaga ahli”—termasuk untuk keluarganya (Hewison & Young 2006; Yeoh 2024). Beda halnya dengan para pekerja migran berketerampilan rendah, mereka mengalami perlakuan beda yang seakan-akan memisahkan mereka sebagai “manusia” dengan jaminan hidup yang layak. Perempuan pekerja migran di sektor domestik lebih kesulitan mendapatkan jaminan kerja akibat perbedaan kebijakan antara sektor formal dengan informal (dalam konteks ini, pekerjaan domestik masuk dalam wilayah informal).

Wilayah kerja informal membuat munculnya banyak perantara kerja yang memainkan pengaturan dan penyaluran migrasi. Hal ini membuka peluang eksploitasi kepada para perempuan pekerja migran di sektor domestik karena tidak ada perlindungan kuat oleh negara. Prinsip pembedaan tenaga kerja ini membuat para pekerja migran dengan keterampilan rendah hanya dianggap sebagai pekerja yang tinggal sementara tanpa proyeksi diizinkan menetap atau berintegrasi dengan masyarakat negara tujuan (Yeoh 2024). Muncul berbagai persoalan diskriminasi yang dialami oleh para pekerja migran dari masyarakat negara tujuan mereka bekerja. Banyak pula dari mereka yang menjadi kambing hitam jika terjadi krisis ekonomi atau krisis kesehatan—seperti yang terjadi pada masa pandemi COVID-19 (Hewison & Young 2006; Goh & Yeoh 2017; Yeoh 2024).

Situasi ini menempatkan para pekerja migran di negara tujuan tanpa jaminan serta perlindungan sosial dan hukum. Pada satu sisi, kehadiran mereka dibutuhkan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak ingin dilakukan oleh masyarakat negara tujuan (seperti pekerjaan kasar, konstruksi bangunan, pekerjaan rumah tangga, dan perawatan), namun di sisi lain, baik negara asal maupun negara tujuan mereka, tidak memberikan jaminan kerja dan kehidupan yang layak sebagai warga negara. Akses mereka pada berbagai hak dan fasilitas dibatasi. Mereka lebih rentan mengalami eksploitasi, penahanan identitas asal, pembatalan kontrak sepihak, hingga mengalami deportasi yang tidak layak. Kondisi ini diperburuk dengan eksploitasi secara komersial oleh perusahaan penyalur kerja yang membebankan risiko kerja pada pekerja migran—cenderung mengeksploitasi kerentanan atas nama keuntungan perusahaan (Yeoh 2024).

Afeksi sebagai Pemicu Kesadaran Politik

Rasa dan emosi pada dasarnya tidak hanya bersifat personal, melainkan hadir juga dari kekuatan sosial yang membentuk individu tersebut—kebertubuhan dan pengalaman kolektif (Ahmed 2004). Ahmed (2004) menegaskan sudut pandang afeksi sebagai sebuah orientasi yang menghadirkan rasa dan emosi sebagai hasil dari interaksi yang terjadi secara berulang dan konsisten, antara individu dengan orang lain (dalam komunitas). Hal ini akan membentuk tubuh individu dan kelompok tidak hanya pada permukaan—lebih mendalam karena ia menyatukan pengalaman. Afeksi kemudian tidak hanya mencerminkan apa yang

dirasakan individu dan kelompok karena di balik itu semua akan terlihat bagaimana relasi kekuasaan bekerja.

Dalam konteks perempuan pekerja migran Indonesia, afeksi hadir lewat keterasingan di negara tujuan, kerinduan akan daerah/negara asal, hingga frustrasi atas ketidakadilan yang dialami selama bekerja. Hal ini yang membentuk kesadaran politik mereka. Pengalaman keterasingan di negara tujuan memosisikan mereka sebagai Yang Liyan, baik dalam struktur sosial negara tujuan maupun dalam narasi politik negara asal. Emosi sering kali diartikulasikan melalui proses pengliyanan ini, ketika kelompok tertentu (Ahmed 2004)—dalam hal ini, pekerja migran perempuan—dianggap sebagai objek yang “berbeda” dan berpotensi mengancam stabilitas sosial serta ekonomi.

Afeksi pada konteks kerinduan atas keluarga di Indonesia tidak hanya menjadi pengalaman emosional, tetapi juga politis. Kerinduan ini melibatkan orientasi ke arah tertentu: ia menghubungkan pekerja migran dengan identitas asal mereka sekaligus menggarisbawahi absennya pengakuan terhadap peran mereka sebagai subjek politik di tingkat nasional. Emosi akan terus melekat pada tubuh individu dan kolektif (Ahmed 2004), membentuk solidaritas di antara pekerja migran perempuan yang memiliki pengalaman serupa.

Frustrasi akibat eksploitasi kerja dan marginalisasi hukum sering kali memicu mobilisasi sosial. Emosi frustrasi ini dapat menciptakan “politik afektif”, ketika perasaan tidak hanya memengaruhi individu, tetapi juga mengalir di antara kelompok, membentuk solidaritas politik. Dalam kasus perempuan pekerja migran Indonesia, emosi kolektif ini dimobilisasi melalui berbagai organisasi antara lain yang dilakukan oleh *Indonesian Migrant Workers Union* (IMWU) di Hong Kong, yang menjadikan pengalaman afektif sebagai landasan untuk menuntut keadilan sosial dan pengakuan politik.

Dengan demikian, afeksi bukan hanya respons emosional terhadap kondisi struktural yang tidak adil, tetapi juga katalis untuk membentuk kesadaran politik dan kolektivitas. Afeksi mengatur “orientasi” tubuh individu terhadap dunia di sekitarnya, memungkinkan mereka untuk membaca ketidakadilan struktural sebagai isu politik yang membutuhkan perubahan sistemik (Ahmed 2004). Dalam kasus perempuan pekerja migran Indonesia, pengalaman afektif seperti keterasingan dan kerinduan menjadi titik awal yang penting untuk membangun solidaritas politik dan gerakan sosial yang berorientasi pada keadilan.

Rekognisi Atas Hak Politik Perempuan Pekerja Migran Indonesia

Setelah memahami persoalan orientasi afeksi dalam situasi ketidakadilan yang dialami oleh perempuan pekerja migran Indonesia, kita dapat mulai menjawab pertanyaan kedua dari penelitian ini, yakni terkait pengakuan (rekognisi) pengalaman perempuan pekerja migran Indonesia. Teori rekognisi dalam penelitian ini berdasarkan pendekatan dari Fraser yang mengajukan gagasan bahwa keadilan sosial memerlukan integrasi antara dua dimensi utama: redistribusi dan rekognisi (Fraser 2003). Dia membedakan ketidakadilan sosial menjadi dua kategori: 1) ketidakadilan ekonomi, yang berakar pada struktur politik-ekonomi; dan 2) ketidakadilan budaya, yang berakar pada pola representasi dan interpretasi sosial. Kedua kategori ketidakadilan ini menunjukkan adanya interaksi yang tidak terpisahkan dalam memahami munculnya ketimpangan sosial. Perlu ada upaya pemahaman atas rekognisi yang terintegrasi dengan dimensi redistributif. Ketidakadilan ekonomi sering kali diperkuat oleh pola ketidakadilan rekognisi, ketika kelompok yang mengalami eksploitasi ekonomi juga menghadapi marginalisasi kultural (Fraser 1997; 2003). Oleh karena itu, solusi keadilan sosial harus mencakup redistribusi ekonomi yang adil sekaligus pengakuan psikososial kultural yang setara.

Rekognisi, menurut Fraser, merujuk pada kebutuhan akan penghormatan terhadap identitas dan martabat individu atau kelompok (2003). Ketidakadilan rekognisi terjadi ketika pola-pola representasi dan nilai-nilai budaya mendiskreditkan identitas kelompok tertentu, menjadikannya tidak diakui atau dihormati. Ketidakadilan ini dapat terwujud dalam bentuk nonpengakuan (*invisibility*) atau penghinaan (*disrespect*). Tanpa rekognisi yang memadai, individu atau kelompok tidak dapat berpartisipasi secara setara dalam kehidupan sosial, budaya, atau politik (Fraser 2003). Rekognisi sendiri dibedakan antara: 1) rekognisi afirmatif, yang mempertahankan perbedaan identitas tanpa mengubah struktur yang mendasari ketidakadilan; dan 2) rekognisi transformasional, yang bertujuan mengubah pola representasi dan nilai-nilai budaya yang menciptakan ketidakadilan tersebut (Fraser 2003). Pendekatan transformasional ini lebih radikal karena mengusulkan rekonstruksi menyeluruh terhadap struktur sosial dan budaya yang mendukung ketidakadilan.

Rekognisi bukan hanya soal penghormatan terhadap identitas individu atau kelompok, tetapi juga

menyangkut partisipasi penuh dalam kehidupan sosial (Fraser 1997; 2003). Tanpa rekognisi, individu atau kelompok tidak dapat menikmati keadilan sosial karena mereka terhalang untuk menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan yang menentukan kehidupan mereka. Oleh karena itu, rekognisi menjadi salah satu pilar utama dalam menciptakan masyarakat yang setara dan inklusif.

Rekognisi memiliki kaitan erat dengan kualitas demokrasi karena keadilan sosial yang dicapai melalui rekognisi tidak hanya menjamin penghormatan terhadap identitas individu atau kelompok, tetapi juga memastikan partisipasi setara mereka dalam kehidupan publik. Ketika rekognisi terwujud, individu atau kelompok tidak hanya diakui secara simbolis, tetapi juga diberdayakan untuk berkontribusi secara penuh dalam proses pengambilan keputusan yang menentukan arah kehidupan bersama.

Teori demokrasi sendiri menekankan relasi dan pentingnya aspek kebebasan individu, hak-hak dasar, partisipasi, dan representasi—sebagai nilai yang juga diperjuangkan melalui pendekatan teori rekognisi. Kualitas demokrasi suatu negara dinilai dari bagaimana responsnya untuk menjawab kepentingan dan kehendak warganya (Soare & Gherghina 2024). Kualitas demokrasi suatu negara dilihat dari bagaimana pemenuhan hak politik warga negaranya. Hak politik merujuk pada jaminan untuk berpartisipasi dalam urusan publik; hak untuk dipilih dan memilih; hak untuk berpartisipasi dalam administrasi publik di negaranya; bergabung dalam partai politik; mencalonkan diri dalam pemilu; serta berpartisipasi bebas dalam rapat politik dan/atau melakukan protes (Conte & Burchill 2009; Conge 1988).

Hak politik dengan demikian tidak terlepas dari hak kewarganegaraan dan menjadi jantung dari masyarakat demokratis. Ini mengapa kualitas demokrasi suatu negara diukur dari responsif tidaknya negara atas persoalan dan kebutuhan warganya agar dapat berpartisipasi dalam politik (Soare & Gherghina 2024). Dalam hal partisipasi politik perempuan pekerja migran, negara belum sepenuhnya hadir merespons tantangan partisipasi dengan memadai.

Beberapa persoalan yang dialami oleh perempuan pekerja migran Indonesia antara lain: 1) Kesulitan dalam menggunakan hak pilih (Hambatan dalam akses politik dan partisipasi): Di Hong Kong dan Makau, mayoritas pekerja migran tidak dapat menggunakan

hak pilih mereka secara langsung di TPS. Sebagai gantinya, pemungutan suara dilakukan melalui metode pos, yang dikenal sulit untuk diawasi dan rentan terhadap kecurangan, seperti hilangnya surat suara atau manipulasi hasil. Tidak adanya kotak suara keliling sebagai alternatif semakin mempersempit akses pekerja migran untuk berpartisipasi. Hambatan struktural ini memperlihatkan bahwa meskipun mereka memiliki hak pilih, kenyataannya akses untuk menggunakan hak tersebut sangat terbatas, menciptakan rasa frustrasi dan kekecewaan (Susilo 2023); 2) Minimnya perhatian pemerintah dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri (Ketidaksiapan penyelenggara pemilu): Penyelenggaraan pemilu di luar negeri tidak dilakukan secara maksimal. Contohnya, tidak ada TPS yang dibuka di konsulat atau KJRI, dan pendataan pemilih tidak akurat sehingga menurunkan partisipasi. Pekerja migran merasa kurang dilibatkan dalam proses ini, menimbulkan rasa alienasi dan frustrasi. Afeksi yang muncul dari minimnya perhatian ini dapat memicu kesadaran politik untuk menuntut representasi yang lebih baik dan akses yang lebih adil terhadap proses pemilu (Idham Holiq dalam Basyari & Purnamasari 2023); 3) Kekhawatiran terhadap transparansi dan potensi kecurangan (Kerawanan dalam metode pemungutan suara via pos): Pemungutan suara melalui pos, yang menjadi satu-satunya metode yang diberlakukan di Hong Kong dan Makau, sangat sulit untuk diawasi oleh pengawas pemilu. Hal ini meningkatkan potensi manipulasi dan kecurangan. Kondisi ini menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem pemilu, yang mendorong kesadaran politik di kalangan pekerja migran tentang perlunya sistem yang lebih transparan dan adil (Idham Holiq dalam Basyari & Purnamasari 2023); 4) Marginalisasi politik pekerja migran (Absennya agenda perlindungan pekerja migran): Selain masalah teknis dalam proses pemungutan suara, agenda perlindungan pekerja migran tidak menjadi prioritas dalam pemilu. Pekerja migran sering kali hanya dianggap sebagai lumbung suara, tanpa ada upaya nyata dari para kontestan politik untuk memperjuangkan hak dan kesejahteraan mereka. Ketiadaan perhatian ini menimbulkan rasa kekecewaan di kalangan pekerja migran, yang mendorong kesadaran bahwa mereka perlu lebih terlibat dalam proses politik untuk memperjuangkan kepentingan mereka sendiri (Susilo 2023); dan 4) Keterbatasan pengawasan dalam pemilu di luar negeri (Minimnya representasi dalam lembaga formal): Karena pemungutan suara dilakukan lewat pos, sulit bagi pengawas pemilu untuk memastikan suara yang diterima dan dihitung benar-

benar sah dan transparan. Tidak adanya TPS atau kotak suara keliling memperburuk situasi ini, memperlihatkan betapa minimnya usaha penyelenggara pemilu untuk memastikan partisipasi yang adil bagi pekerja migran (Idham Holiq dalam Basyari & Purnamasari 2023). Kondisi ini bisa memunculkan kesadaran politik di kalangan pekerja migran bahwa mereka sering kali terabaikan dalam proses formal sehingga mereka merasa perlu memperjuangkan hak-hak mereka di luar jalur-jalur politik formal (Susilo 2023).

Partisipasi politik perempuan pekerja migran tidak hanya terbatas pada politik elektoral atau nasional, melainkan juga mencakup bentuk-bentuk partisipasi lain yang sama penting dan validnya. Meskipun tingkat partisipasi mereka dalam politik formal atau nasional relatif rendah, hal ini dapat diimbangi dengan keterlibatan mereka dalam politik lokal dan informal, yang menawarkan ruang-ruang partisipasi yang lebih inklusif dan relevan bagi kehidupan sehari-hari mereka (Lindekilde dalam Momesso 2022). Dengan demikian, partisipasi politik perempuan pekerja migran seharusnya dilihat secara lebih luas, melampaui batasan politik konvensional.

Pentingnya rekognisi atas hak politik perempuan pekerja migran Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran mereka sebagai kontributor signifikan bagi perekonomian nasional dan transnasional. Rekognisi ini tidak hanya mencakup pengakuan formal terhadap hak-hak politik mereka, tetapi juga penghargaan atas partisipasi mereka dalam kehidupan publik. Tanpa rekognisi yang memadai, perempuan pekerja migran Indonesia akan terus berada di pinggir sistem demokrasi—dilihat sebagai penyumbang suara tanpa akses penuh untuk berkontribusi secara substantif dalam proses politik. Keadilan tidak hanya soal redistribusi sumber daya, tetapi juga rekognisi yang memungkinkan partisipasi setara bagi semua kelompok. Dalam konteks ini, rekognisi atas hak politik perempuan pekerja migran harus mencakup transformasi struktural yang memperbaiki hambatan partisipasi mereka, memastikan proses pemilu yang inklusif dan adil, serta menempatkan mereka sebagai subjek politik yang sah. Hanya dengan rekognisi yang komprehensif, demokrasi Indonesia dapat benar-benar menjadi demokrasi yang inklusif, responsif, dan berkeadilan sosial—termasuk di dalamnya melibatkan secara penuh perempuan pekerja migran Indonesia.

Refleksi Gerakan Sosial dan Politik Perempuan Pekerja Migran Indonesia

Hak politik perempuan pekerja migran Indonesia kemudian menjadi penting untuk kita sorot. Perempuan pekerja migran Indonesia pada dasarnya memiliki hak politik yang sama sebagai warga negara Indonesia. Namun, pada kenyataannya dalam pembuatan kebijakan bahkan sampai tahap melibatkan dalam kegiatan politik, mereka diabaikan. Salah satu contohnya adalah tidak adanya perhatian negara Indonesia dalam menjamin hak pilih, khususnya dalam konteks pemilu di luar negeri. Meskipun perempuan pekerja migran memiliki hak suara sebagai bagian dari kewarganegaraan mereka, proses politik yang mereka alami menunjukkan adanya kesenjangan keterlibatan langsung antara pengalaman afektif mereka dan perhatian negara terhadap emosi tersebut. Pengalaman mereka mencerminkan emosi yang menunjukkan adanya relasi kuasa yang timpang ketika negara hanya hadir sebagai pengatur teknis, bukan sebagai pihak yang benar-benar terhubung dengan emosi dan realitas mereka.

Afeksi atas emosi yang dirasakan oleh para perempuan pekerja migran Indonesia akibat keterbatasan akses politik, kurangnya infrastruktur pemilu yang inklusif, dan minimnya perlindungan politik bukanlah pengalaman yang berdiri sendiri. Emosi ini hadir secara kolektif (Ahmed 2004) termasuk secara institusional—tidak hanya “dimiliki” oleh individu. Emosi yang dirasakan perempuan pekerja migran sebenarnya menjadi cermin dari absennya negara dalam merespons kebutuhan mereka secara empatik. Negara memisahkan diri dari bagian emosi kolektif pengalaman perempuan pekerja migran Indonesia. Akibatnya, negara gagal mengartikulasikan kebijakan dan perlindungan yang memberikan pengakuan atas emosi kolektif sebagai basis pengambilan keputusan politik.

Orientasi afektif atas hak politik ini menjadi perwujudan demokrasi yang adil di suatu negara. Ketidakhadiran negara dalam emosi perempuan pekerja migran memperkuat orientasi afektif mereka terhadap hak politik. Ketika frustrasi dan kekecewaan terus diabaikan, perempuan pekerja migran mulai menyadari bahwa partisipasi mereka dalam politik elektoral atau formal tidak dihargai secara penuh. Hal ini tidak hanya menciptakan jarak emosional antara negara dan warganya, tetapi juga mendorong perempuan pekerja migran untuk mencari bentuk-bentuk partisipasi lain

yang memungkinkan mereka menyuarakan kebutuhan dan kepentingan mereka.

Orientasi afektif ini, yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari mereka, menjadi titik awal kesadaran politik yang lebih luas. Sebagai contoh, minimnya perhatian negara terhadap penyelenggaraan pemilu di luar negeri, seperti terbatasnya akses ke tempat pemungutan suara atau ketidaksiapan dalam memastikan transparansi proses pemilu, menunjukkan bahwa negara hanya hadir sebagai fasilitator pasif. Ketiadaan negara sebagai entitas yang benar-benar memahami dan terlibat dalam emosi kolektif ini membuat perempuan pekerja migran merasa terasing dari proses politik yang seharusnya menjadi hak mereka. Orientasi afektif yang lahir dari pengalaman ini memperkuat kesadaran mereka bahwa hak politik tidak hanya berarti hak untuk memilih, tetapi juga hak untuk terlibat dalam proses politik yang inklusif dan transparan.

Dalam konteks ini, afeksi menjadi lebih dari sekadar respons emosional terhadap ketidakadilan; ia berfungsi sebagai mekanisme untuk mengidentifikasi kesenjangan antara negara dan warga negaranya. Kesenjangan ini menegaskan pentingnya pengakuan atas hak politik perempuan pekerja migran tidak hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi sebagai tanggung jawab emosional dan politis negara untuk hadir dalam pengalaman kolektif mereka. Dengan demikian, orientasi afektif perempuan pekerja migran terhadap hak politik mereka tidak hanya mencerminkan perlawanan terhadap eksklusi, tetapi juga menjadi seruan untuk kesadaran politik yang lebih dalam dan keterlibatan negara yang lebih empatik.

Negara tidak hanya telah menolak secara afektif atas pengalaman perempuan pekerja migran Indonesia. Negara bahkan absen atas pengakuan yang substansial terhadap keberadaan perempuan pekerja migran Indonesia. Absennya negara dalam menanggapi emosi kolektif ini tidak hanya memperdalam jarak emosional, tetapi juga mengungkapkan kurangnya rekognisi atas hak politik perempuan pekerja migran sebagai subjek penuh dalam sistem politik. Persoalan afektif yang mereka alami tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan akan rekognisi yang lebih komprehensif, yang meliputi pengakuan atas martabat, pengalaman, dan hak politik mereka. Perempuan pekerja migran Indonesia bukan hanya mesin pencetak devisa bagi keuntungan ekonomi negara, mereka juga adalah warga negara Indonesia yang sah dan berhak atas perlindungan—termasuk ketika berada di negara tujuan bekerja.

Ketiadaan rekognisi pengalaman perempuan pekerja migran dalam proses politik Indonesia justru menunjukkan jurang ketimpangan yang mendalam. Ketika perempuan pekerja migran Indonesia hanya dianggap sebagai sumber penghasilan ekonomi negara, terjadi marginalisasi secara politis yang mengabaikan kehadiran mereka sebagai warga negara—baik di Indonesia, maupun sebagai WNI di negara tujuan mereka. Eksploitasi secara ekonomi ini pun terlihat dari bagaimana mereka diupah dengan rendah dan berada dalam kondisi kerja yang rentan. Ketidakadilan ekonomi ini tentunya terjadi akibat adanya ketidakadilan dalam konteks tidak adanya rekognisi atas pengalaman mereka. Perempuan pekerja migran Indonesia tidak hanya dipandang sebagai tenaga kerja murah, tetapi juga direduksi menjadi “warga negara kelas dua” yang tidak sepenuhnya diakui hak politiknya. Ketidakhadiran rekognisi ini mencakup tidak adanya pengakuan (*invisibility*) dalam kebijakan negara, serta penghinaan (*disrespect*) yang muncul dari stereotip tentang pekerja migran sebagai kelompok yang tidak penting dalam struktur politik.

Dalam konteks pemilu, perempuan pekerja migran Indonesia sering kali dihadapkan pada berbagai hambatan yang mencerminkan kesenjangan dalam rekognisi politik. Tidak adanya tempat pemungutan suara (TPS) yang memadai di negara tujuan atau metode pemungutan suara yang sulit diawasi, seperti melalui pos, menunjukkan bahwa negara gagal mengakui peran mereka sebagai subjek politik yang sah. Hambatan ini tidak hanya membatasi hak mereka untuk memilih, tetapi juga menciptakan rasa keterasingan dan kekecewaan. Kondisi ini memperkuat pola ketidakadilan yang menjebak perempuan pekerja migran dalam lingkaran subordinasi ekonomi dan kultural.

Solusi integrasi redistribusi dengan rekognisi menjadi penting untuk diperhatikan. Kita perlu menghadirkan perlindungan hukum terhadap pekerja migran—termasuk di dalamnya perempuan pekerja migran Indonesia yang banyak bekerja di sektor informal (sebagai tenaga kerja berketerampilan rendah)—dan akses yang lebih mudah ke proses politik seperti pada pemilu (baik memilih atau dipilih). Upaya ini harus disertai dengan rekognisi yang memastikan bahwa perempuan pekerja migran dipandang sebagai bagian integral dari demokrasi Indonesia. Pengakuan ini tidak hanya mencakup penghormatan terhadap hak politik mereka, tetapi juga transformasi pola representasi budaya yang mendiskreditkan posisi mereka sebagai

warga negara. Rekognisi menjadi elemen penting dalam mengatasi kesenjangan demokrasi yang dihadapi perempuan pekerja migran. Tanpa rekognisi, upaya redistribusi ekonomi hanya akan menghasilkan solusi parsial yang gagal menyentuh akar persoalan. Sebaliknya, dengan memastikan bahwa perempuan pekerja migran diakui secara penuh dalam struktur politik dan budaya, Indonesia dapat membangun demokrasi yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan seluruharganya.

Kedua pendekatan afeksi dan rekognisi ini kemudian membuka sebuah elemen unik yang dimiliki oleh perempuan pekerja migran. Identitas transnasional menjadi elemen unik yang memperkaya gerakan sosial perempuan pekerja migran Indonesia. Sebagai pekerja migran yang tersebar di berbagai negara, mereka membawa perspektif lintas batas yang memungkinkan mereka untuk mengadopsi strategi mobilisasi dari konteks lokal dan internasional. Misalnya, gerakan perempuan pekerja migran Indonesia di Hong Kong, tetap mempertahankan narasi lokal yang mencerminkan kebutuhan dan pengalaman mereka sendiri. Identitas transnasional ini memungkinkan mereka untuk menjembatani berbagai konteks budaya dan politik, menciptakan gerakan sosial yang fleksibel namun tetap terfokus pada tujuan bersama.

Keunikan dari gerakan sosial perempuan pekerja migran Indonesia adalah kemampuan mereka untuk mengintegrasikan bentuk-bentuk partisipasi politik non-formal ke dalam perjuangan mereka. Meskipun sering kali terhalang oleh hambatan struktural dalam politik formal, mereka memanfaatkan ruang-ruang informal seperti komunitas berbasis budaya, organisasi buruh migran, dan media sosial untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Pendekatan ini mencerminkan kemampuan mereka untuk menavigasi dan menantang batas-batas politik konvensional, menciptakan ruang baru untuk keterlibatan yang inklusif dan relevan. Dengan memanfaatkan kekuatan kolektif yang berakar pada pengalaman afektif, tuntutan rekognisi, dan identitas transnasional, perempuan pekerja migran Indonesia dapat menciptakan gerakan sosial yang tidak hanya unik tetapi juga transformatif secara struktural dan kultural.

Penutup

Perempuan pekerja migran Indonesia memiliki pengalaman yang sangat spesifik dan kolektif, yang membedakan mereka dari kelompok lain dalam

perjuangan politik. Keunikan ini berakar pada identitas transnasional yang mempertemukan kombinasi kondisi ekonomi, status migrasi, dan identitas budaya yang mereka bawa. Penelitian filosofi ini telah menghadirkan refleksi yang membahas kompleksitas ketidakadilan yang dialami perempuan pekerja migran Indonesia dalam konteks hak politik mereka. Dengan memadukan perspektif afeksi dan rekognisi, penelitian ini menyoroti bagaimana pengalaman emosional kolektif seperti keterasingan dan frustrasi tidak hanya mencerminkan kondisi ketidakadilan, tetapi juga menjadi katalis bagi pembentukan kesadaran politik. Di sisi lain, absennya rekognisi atas hak dan pengalaman perempuan pekerja migran memperkuat marginalisasi politik mereka, baik dalam proses demokrasi formal maupun dalam ruang sosial yang lebih luas.

Salah satu faktor utama yang membentuk keunikan gerakan sosial mereka adalah pengalaman afektif yang dihasilkan dari keterasingan, eksploitasi, dan ketiadaan rekognisi dalam sistem sosial-politik. Afeksi ini tidak hanya mencerminkan kesenjangan struktural, tetapi juga memicu solidaritas yang kuat di antara mereka, menciptakan dasar bagi mobilisasi kolektif yang berorientasi pada keadilan sosial. Rekognisi juga memainkan peran penting dalam perjuangan mereka. Perempuan pekerja migran Indonesia sering kali direduksi menjadi "tenaga kerja murah" atau "kontributor devisa" tanpa jaminan dan perlindungan atas hak mereka sebagai warga negara. Gerakan sosial mereka mencerminkan tuntutan untuk diakui sebagai subjek politik penuh, baik di negara asal maupun di negara tujuan.

Afeksi dan rekognisi merupakan dua dimensi yang saling melengkapi dalam memahami dan menjawab persoalan ketidakadilan yang dialami oleh perempuan pekerja migran Indonesia. Afeksi, yang berakar pada pengalaman emosional kolektif seperti keterasingan, kerinduan, dan frustrasi, tidak hanya menjadi respons terhadap ketidakadilan struktural, tetapi juga berfungsi sebagai pemicu kesadaran politik dan solidaritas. Pengalaman afektif ini menjadi dasar untuk membangun kekuatan kolektif dalam menuntut perubahan yang lebih inklusif dan adil. Namun, pengalaman afeksi ini tidak akan bermakna tanpa adanya rekognisi. Tanpa rekognisi, perempuan pekerja migran Indonesia akan terus terpinggirkan dalam sistem demokrasi, hanya dipandang sebagai sumber devisa tanpa akses penuh untuk berpartisipasi secara substantif dalam proses politik. Rekognisi harus diwujudkan tidak hanya melalui pengakuan formal, tetapi juga melalui transformasi

struktural dan kultural yang memastikan keadilan ekonomi serta pengakuan atas pengalaman mereka.

Berdasarkan penelusuran dan refleksi filosofis dalam penelitian ini, kami merekomendasikan beberapa tindakan nyata yang dapat dilakukan: 1) Pengelolaan afeksi melalui program pendidikan politik yang berbasis komunitas. Program ini adalah bentuk pengelolaan terbaik atas emosi kolektif yang berdasarkan pengalaman perempuan pekerja migran sehingga mereka dapat ditempatkan sebagai subjek politik yang aktif; 2) Pendokumentasian dan promosi atas praktik baik terhadap kerja yang telah dilakukan organisasi sosial buruh migran. Pemerintah negara dapat mendukung inisiatif ini melalui kerja sama dan jaringan solidaritas buruh migran di tiap negara tujuan PMI bekerja. Pemerintah juga harus memfasilitasi pendekatan transnasional yang berkolaborasi dengan negara lain dan organisasi buruh internasional; dan 3) Rekognisi atas PMI khususnya perempuan pekerja migran tanpa terkecuali (seluruh tingkat keterampilan) dalam kebijakan publik. Pemerintah wajib merekognisi atas mereka sebagai bagian dari agenda kebijakan yang memberikan perlindungan hukum dan akses politik. Hal ini juga termasuk melakukan edukasi kepada para pemangku kebijakan, terkait dengan pentingnya rekognisi atas perempuan pekerja migran sebagai kontributor ekonomi dan subjek politik. Dengan mengintegrasikan afeksi dan rekognisi ke dalam pendekatan kebijakan dan advokasi, Indonesia dapat menciptakan demokrasi yang benar-benar inklusif. Sudah seharusnya negara memberikan jaminan dan juga ruang bagi perempuan pekerja migran untuk menjadi subjek politik yang aktif, terlibat, dan dihargai.

Daftar Pustaka

- Ahmed, S. 2004. *The Cultural Politics of Emotion*. Edinburgh University Press: UK.
- Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). 2024. *Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Periode Desember 2023*. Diakses September 2024 pada <https://www.bp2mi.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-pelindungan-pekerja-migran-indonesia-periode-desember-2023>.
- Basyari, I. & Purnamasari, D. D. 2023. Pemilih di Hong Kong dan Makau hanya bisa memilih lewat pos. *Kompas.id*. Retrieved from <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/12/17/pemilu-2024-dan-peminggiran-pekerja-migran-indonesia>
- Conge, P. J. 1988. Review: The Concept of Political Participation: Toward Definition. *Comparative Politics*, Vol. 20, No. 2, hlm. 241--249.
- Conte, A. & Burchill, R. 2009. *Defining Civil and Political Rights*. Routledge: London.
- Fraser, N. 1997. *Justice Interruptus*. Routledge: New York & London.
- Fraser, N. 2003. Social Justice in the Age of Identity Politics: Redistribution, Recognition, and Participation. Dalam *Redistribution or Recognition? A Political-Philosophy Exchange*, hlm. 7--109. Verso: London & New York.
- Goh, C., Wee, K., & Yeoh B. S. A. 2017. Migration Governance and the Migration Industry In Asia: Moving Domestic Workers from Indonesia to Singapore, *International Relations of the Asia-Pacific* 17, hlm. 401--433.
- Hewison, K. & Young K. 2006. *Transnational Migration and Work in Asia*. Routledge: London.
- Karan, K., Gimeno, J. D. M., & Tandoc, E. Jr. 2009. "The Internet and Mobile Technologies in Election Campaigns: The GABRIELA Women's Party during the 2007 Philippine Elections". *Journal of Information Technology & Politics* <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19331680903047420>.
- Lindekilde, L. 2009. Political Participation, Organisation and Representation of Ethnic Minorities in Denmark: Recent Developments and future Challenges. *Emilie Working Paper*. Available at: http://ec.europa.eu/ewsi/en/resources/detail.cfm?ID_ITEMS=21749/.
- Lindio-McGovern, L. 2019. Neoliberal Globalization and Transnational Women's Movements in the Early Twenty-First Century. *The Palgrave Handbook of Social Movements, Revolution, and Social Transformation*, Berberoglu, B. (eds). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-319-92354-3_15.
- Momesso, L. (2022). "I Vote so I am": Marriage migrants' political participation in Taiwan. *Journal of Current Chinese Affairs*, 51(2), hlm. 241--264. <https://doi.org/10.1177/18681026221079834> Solidaritas Perempuan. 2024.
- Solidaritas Perempuan. 2024. Agenda Politik Feminis Perempuan Buruh Migran Tidak Menjadi Prioritas Visi Misi Capres dan Cawapres pada Pemilu 2024. Diakses September 2024 pada <https://www.solidaritasperempuan.org/agenda-politik-feminis-perempuan-buruh-migran-tidak-menjadi-prioritas-visi-misi-capres-dan-cawapres-pada-pemilu-2024/>.
- Soare, S. & Gherghina, S. 2024. The political Participation and Representation of Migrants: An Overview. *Politics and Governance*, 12(Issue: The Political Representation and Participation of Migrants). <https://doi.org/10.17645/pag.i354>.
- Susilo, W. 2023. Pemilu 2024 dan Peminggiran Pekerja Migran Indonesia. *Kompas.id*. Retrieved from <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/12/17/pemilu-2024-dan-peminggiran-pekerja-migran-indonesia>.
- The Indonesian Migrant Workers Union Hong Kong (IMWU). 2022. *Organising Indonesian Migrant Domestic Workers in Hong Kong to Combat Overcharging and Illegal Collection of Agency Fees*. Asia Pacific Forum on Women, Law and Development, diakses pada September 2022, di <https://apwld.org/wp-content/uploads/2022/01/IMWU-INDONESIA-final.pdf>.
- United Nation (UN). 2007. *The Fight Against Violence on Women in The Philippines: The GABRIELA Experience*, diakses pada September 2024, di <https://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/ngocontribute/Gabriela.pdf>.

Yeoh, B. S. A. 2024. Labour Migration System in Southeast Asia. Dalam *Bundeszentrale für politische Bildung*, diakses pada Oktober 2024, di <https://www.bpb.de/themen/migration-integration/regionalprofile/english-version-country-profiles/545531/labour-migration-system-in-southeast-asia/>.

Catatan Akhir

- 1 Sara Ahmed (1969—) adalah seorang penulis dan akademisi berkebangsaan Inggris-Australia yang fokus pada riset dan pengembangan kajian (terinterseksi) feminisme, feminisme lesbian, teori queer, *affect theory*, *critical race theory*, dan pascakolonialisme. Ahmed banyak mengeksplorasi dimensi sosial dan sirkulasi emosi dalam melihat persoalan ketidakadilan yang interseksional.
- 2 Nancy Fraser (1947—) adalah seorang filsuf, ahli teori kritis, dan feminis yang berasal dari Amerika Serikat. Fraser dikenal dengan teori politik identitas dan konsep keadilan—salah satunya dengan lewat tulisannya yang mengajukan pertemuan redistribusi, rekognisi, dan partisipasi—dalam rangka mengkritik persoalan ketidakadilan sosial, terutama dalam perspektif kritik feminisme liberal kontemporer.

